

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Suatu negara dapat mempengaruhi keamanan internasional atau wilayah yang saling berdekatan maupun dalam lingkup daerah yang sama. Dinamika keamanan regional ini selalu menjadi pembahasan yang menarik untuk dibahas dalam isu global. Salah satunya yaitu situasi yang sedang bersitegang di Semenanjung Korea. Semenanjung Korea dalam perjalanan sejarahnya telah termasuk ke dalam daerah yang berpengaruh di wilayah tersebut selaku kawasan yang mempertemukan Asia Timur Laut dengan zona luar.

Korea berada dalam sudut strategis bermakna yang disebabkan oleh letak geografis Korea yang berada di antara 3 negara besar antara lain Rusia, Tiongkok, serta Jepang.¹ Ketiga negara besar tersebut merupakan para pelaku yang mengusik pertumbuhan Negeri Korea pada zaman dahulu. Sebaliknya, di era digital seperti sekarang ini justru AS yang turut andil dan serta-merta tersangkut masalah negeri kedua Korea.

Perang dingin yang berlangsung diantara dua Korea diakibatkan oleh kedua Negara menganut ideologi yang berbeda dimana Korea Utara yang bersekutu dengan Blok Timur (Uni Soviet) menjalankan paham Sosialis-komunis dan Korea Selatan yang bersekutu dengan Blok Barat (AS) menjalankan paham Demokratis-

¹ Yang Seung-Yoon dan Mohtar Mas' oed, *Masyarakat, Politik, dan Pemerintahan Korea : Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), hal.1.”

Liberal. Kedua pihak sama-sama mengontrol wilayah pengaruh untuk mempertahankan taktis *national interest* pada kesimpulannya hendak mempengaruhi politik serta stabilitas kedamaian di Semenanjung Korea maupun kawasan Internasional secara lebih luasnya.²

Kedua kubu pemerintahan saling menuntut wilayah kekuasaan di semenanjung dan menimbulkan meledaknya konflik Korea. Pada bulan Juli 1950, Militer Korea Utara yang disebut *Korean's People Army* melewati wilayah tapal batas 38 derajat lintang utara dengan tujuan menginvasi pertahanan Korea Selatan, hal inilah yang menjadi pemicu dimulainya peperangan. Dikarenakan hal tersebut maka diadakanlah perundingan dan persetujuan gencatan senjata tahun 1953 yang ditandatangani oleh Cina, AS, dan Korea Utara akibat dari situasi perang yang semakin memanas pada tanggal 27 Juli. Syngman Rhee yang menjabat sebagai Presiden Korea Selatan (1948-1960) pada masa itu menentang untuk menyetujui kesepakatan tersebut tetapi bersepakat untuk menghargai kesepakatan peperangan senjata, itulah yang menyebabkan situasi peperangan di Korea belum berakhir untuk saat ini.³

Korea Utara merubah negaranya menjadi amat tertutup semenjak terpecahnya Semenanjung Korea sehingga menyebabkan hubungan Korea Utara dengan dunia internasional, terutama Korea Selatan menjadi amat sempit serta diawasi dengan tajam. Berbagai jalur yang dilakukan demi mendinginkan peperangan ini senantiasa dilaksanakan menimbang kedudukan Korea Utara yang

² Ibid.

³ Fahrin Umarama, dkk., "Prospek Penyelesaian Konflik Korea Selatan dan Korea Utara", *Jurnal Politico*, Vol.7 No.4 (2018), hal.2.

terus menjadi terasingkan dalam hubungan sosial lingkup internasional yang disebabkan oleh pandangan negatif dihadapan dunia semenjak Korea Utara memulai melaksanakan rancangan nuklirnya dilanjutkan dengan peningkatan potensi senjata misil dengan rangkaian tes uji coba menyebabkan bertambah buruknya suasana di Korea Utara dalam segi politis maupun ekonomi.

Kekuatan senjata nuklir Korea Utara terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan Pyongyang, ibu kota Korea Utara, telah melaksanakan uji coba bermacam-macam peluru kendali jarak pendek hingga yang ditembakkan melalui kapal selam dan terhitung sudah melaksanakan percobaan tersebut sebanyak 6 kali sejak tahun 2006, termasuk pada percobaan hulu ledak nuklir yang disebut sebagai rudal balistik antarbenua.⁴ Bersamaan dengan hal tersebut, Korea Selatan juga tetap membangun jaringan aliansi militer bersama Amerika Serikat. Korea Selatan sempat melaksanakan latihan militer bersama dengan AS dalam skala yang cukup luas pada tahun 2017 dengan mengirim sejumlah pesawat perang kepunyaan Amerika Serikat serta mengirim sekitar 12.000 pasukan militer Amerika Serikat ke Korea Selatan.⁵

Dalam hal ini, Korea Selatan menawarkan perspektif yang berbeda dengan membuat langkah negosiasi persahabatan dengan Korea Utara sebagai senjata primer. Melalui jalinan yang baik antar bangsa Korea diharapkan dapat

⁴ Michael J. Mazzar, dkk., *"The Korean Peninsula: Three Dangerous Scenarios"*, RAND Corporation, 2018, <https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE262.html> (diakses pada 1 November 2022).

⁵ Chloe Chaplain, *"US and South Korea Join Forces in Biggest Military Training Exercise Amid North Korea Tensions"*, Evening Standard, 4 Desember 2017, <https://www.standard.co.uk/news/world/us-and-south-korea-join-forces-in-biggest-military-training-exercise-amid-north-korea-tensions-a3709826.html> (diakses pada 1 November 2022)

mempersiapkan gerakan transformasi ke arah perspektif rezim otoriter Korea Utara berkenaan dengan dunia internasional. Jaringan tersebut diintensifkan dengan beberapa pertemuan tingkat Perdana Menteri yang dilaksanakan di Pyongyang dan Seoul. Terhitung pertemuan tersebut telah dilaksanakan sebanyak delapan kali hingga akhir tahun 1992. Berbagai komisi dibentuk sebagai hasil dari pertemuan tersebut. Sebagian dari komisi-komisi tersebut mengadakan beberapa kongres di Panmunjom dan diikuti oleh para petinggi dari kedua Negara. Tetapi upaya ini kemudian terhenti karena penentangan Korea Utara atas pelatihan militer bersama antara Korea Selatan dengan "Team Spirit" AS pada tahun 1993.⁶

Rezim Korea Selatan semenjak periode kepemimpinan Roh Tae Woo, Kim Yong Sam, Kim Dae Jung, dan Roh Moo Hyun menerapkan tiga pilar politiknya melalui kelangsungan kerja sama, perdamaian, dan penyatuan kembali atau reunifikasi dalam menjalankan proses reformasi keamanan di Semenanjung Korea. Ketiga pilar ini terus diimplementasikan dan digunakan sebagai strategi yang dilakukan Korea Selatan untuk menghadapi Korea Utara. Langkah dari aliansi tersebut dijalankan dengan tujuan menjadi *ice breaker* atau pengurai ketegangan yang terjadi dalam hubungan kedua negara tersebut. Kerja sama dilaksanakan dalam 2 bentuk, yakni kerja sama perekonomian dan perdamaian sehingga masalah nuklir tidak terus mendominasi topik Semenanjung Korea.⁷

Memahami konteks keadaan dan perbedaan yang jelas antar kedua negara, Korea Selatan mengembangkan kebijakan yang menekankan pentingnya koehsi

⁶ Pramudito, "Tinjauan Prospek Perdamaian di Semenanjung Korea", *Jurnal Caraka*, Vol.1 No.5 (February-Maret 1998), hal.90.

⁷"Huh Moon Young, dkk., *Basic Reading on Korean Unification* (Seoul: Korea Institute for National Unification: 2012), hal.118."

atau kebersamaan antar kedua Korea selama masa kepemimpinan Kim Dae Jung (1998-2002) dan Roh Moo Hyun (2003-2008). Upaya penyatuan ini diwujudkan dalam kebijakan Kim Dae Jung yakni *Sunshine Policy* dan kebijakan Roh Moo Hyun yang dikenal sebagai *Peace and Prosperity Policy*. Kim Dae Jung melibatkan Korea Utara di sekian korelasi ekonomi melalui kebijakan *Sunshine* yang dimilikinya. Itulah sebabnya pemerintah Kim Dae Jung melakukan upaya tak kenal lelah untuk menciptakan suasana perdamaian, keharmonisan, dan kerja sama antar kedua wilayah, dibandingkan dengan koneksi yang saling bersitegang, skeptis, dan persaingan antara kedua negara yang memakan anggaran politik dengan percuma.⁸

Namun jalan *Sunshine Policy* tidak berlayar semulus yang dimimpikan lantaran terhambat oleh kendala yang menyebabkan strategi perdamaian dengan tujuan reunifikasi yang digagas oleh Kim Dae Jung tidak mampu beroperasi dengan prima. Beberapa hambatan tersebut yakni dikarenakan kontradiksi ideologi yang dipangku Korea Utara dan Korea Selatan. Kedua, mengenai masalah senjata pemusnah massal yang sedang dikembangkan oleh Korea Utara, yaitu nuklir, rudal, dan biokimia. Ketiga, Korea Utara menghadapi krisis kemanusiaan seperti krisis pangan (*Famishment*), kerusuhan, serta kemungkinan transmigrasi besar-besaran dan bahaya militer secara global. Halangan terbesar dalam menghadapi berbagai tantangan muncul sebab kenyataan bahwa tidak adanya kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama dengan Negara tetangga yang secara berkesinambungan maupun tidak dapat mempengaruhi setiap langkah yang diambil oleh Pyongyang.⁹

⁸“Yang Seung-Yoon dan Mohtar Mas’oed, *Politik Luar Negeri Korea Selatan: Penyesuaian Diri Terhadap Masyarakat Internasional* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), hal.41.”

⁹ Atiqah, “Dilema Keamanan Korea Selatan dalam Menghadapi Nuklir Korea Utara”, *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, Vol.15 No.3 (September 2017), hal.178.

Ketegangan di Semenanjung Korea telah menarik dunia internasional ke dalam konflik tersebut. Amerika Serikat selaku kolega Korea Selatan dan Cina selaku kolega Korea Utara ikut terjebak di ketegangan ini. PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) juga menilik isu yang terjadi dengan menyatakan beberapa putusan terkait untuk menghentikan pengembangan nuklir yang dijalankan Korea Utara, tetapi Korea Utara belum mengimplementasikannya. PBB juga membangun resolusi berbentuk pembatasan penjualan, pasokan, maupun transfer minyak mentah ke Korea Utara dalam jangka waktu 1 tahun.¹⁰

Selain itu, ASEAN juga ikut memelihara ikatan yang baik dengan kedua Korea. Asosiasi di bidang politik serta keamanan ASEAN-Korea Selatan (ASEAN-ROK) diperkuat melalui wacana teratur dan transfigurasi pemahaman mengenai topik kawasan serta internasional dengan metode seperti Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN-ROK, Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN-ROK, ASEAN *Defense Ministerial Meeting Plus*, ASEAN *Plus Three* (APT), serta korelasi dalam aspek ekonomi melalui pendirian ASEAN-Korea *Free Trade Area* (AKFTA). Korea Utara juga memiliki jaringan diplomasi bersama melalui anggota-anggota ASEAN. Selain itu, pada tahun 2008 Korea Utara telah menyepakati persetujuan persaudaraan serta aliansi untuk wilayah Asia Tenggara yang disebut sebagai *Treaty of Amity and Cooperation (TAC)* dan membentuk kejadian yang eksklusif sebab

¹⁰ United Nations, “UN Documents for DPRK (North Korea)” <https://www.securitycouncilreport.org/un-documents/dprk-north-korea/> (diakses pada 2 November 2022).

secara perdana Korea Utara ikut serta bergabung dalam konsesus landasan aturan di kawasan.¹¹

Negara-negara anggota ASEAN sendiri mempunyai jalinan yang kukuh bersama Amerika Serikat serta Cina selaku sekutu kedua Korea. Amerika Serikat memiliki beberapa perjanjian perdagangan dengan ASEAN, seperti *The US-Singapore Free Trade Agreement (FTA)*, *US-ASEAN Trade and Investment Framework Agreement (TIFA)*, dan beberapa perjanjian perdagangan lainnya. Amerika Serikat dan ASEAN merajut ikatan dalam beberapa aspek, seperti bekerja sama dalam militer serta maritim bersama beberapa peserta ASEAN, antara lain yakni Filipina, Thailand, Indonesia, dan Malaysia. Selain itu, ASEAN megantongi beberapa aliansi bersama Cina, antara lain yakni, *Cina-ASEAN Joint Committee on Scientific and Technological Cooperation*, *Cina-ASEAN Joint Committee on Economic and Trade Cooperation*, dan *Cina-ASEAN Joint Committee on Cooperation and ASEAN Beijing Committee*.¹²

Dalam hal ini, ASEAN berupaya bermain andal untuk menyelesaikan isu-isu di Semenanjung Korea. ASEAN dikenal memakai skema kemufakatan untuk meraih putusan dimana seluruh anggota perlu sepakat memutuskan tindakan yang akan dijalankan oleh ASEAN. Jika terdapat anggota yang berbeda pendapat, maka agenda kesepakatan yang dikemukakan berhak ditarik kembali sebab tidak mencapai syarat persetujuan dalam sistem konsesus.¹³ Situasi ini diperumit

¹¹ Gaffar Mu'aqaf, dkk., "Bergayuh Agar Tak Lumpuh: Proyeksi Peran ASEAN dalam Penyelesaian Isu Semenanjung Korea", *Indonesian Perspective*, Vol.3 No.2 (Desember 2018), hal.89.

¹² Deng Xijun, "Working Together Toward a Closer China-ASEAN Community with a Shared Future", 23 November 2021 http://asean.china-mission.gov.cn/eng/stxw/202111/t20211123_10451892.htm (diakses pada 2 November 2022).

¹³ Gaffar Mu'aqaf, Op.Cit., hal.90.

dengan keterlibatan Amerika Serikat serta Cina mengenai isu Semenanjung Korea. Kedua negara *power* tersebut sama-sama berupaya merealisasikan urgensi sendiri-sendiri, sekaligus menghasut pembuatan putusan ASEAN terkait proses menangani isu peperangan Semenanjung Korea.

Dari penjelasan di atas, penelitian ini akan berfokus untuk membahas peran Negara Indonesia sebagai pemeran utama dalam ASEAN untuk menangani kasus di Semenanjung Korea ini. Selaku anggota ASEAN yang berhubungan akrab dengan Korea Selatan dan mempunyai jalinan *two-sided* dengan Korea Utara selama 50 tahun, Indonesia menunjang tercapainya situasi damai berkepanjangan di wilayah Semenanjung Korea dengan mengacu pada kebijakan luar negeri yang dilaksanakan oleh Indonesia. Tidak hanya itu, penelitian ini mengkaji mengenai kemungkinan bahaya yang hendak dijumpai bagi Indonesia mengenai kasus konflik di Semenanjung Korea.

Dengan menggunakan konsep manajemen konflik, Indonesia yang berperan sebagai mediator atau pihak ketiga dalam isu konflik Semenanjung Korea ini terus berusaha memudahkan para kubu yang berkonflik dengan beragam kongres diskusi untuk menjauhi peperangan frontal. Sebagai usaha Indonesia selaku promotor yang dipercaya untuk menuntaskan perang di Semenanjung Korea, pemerintah Indonesia harus menganalisis persoalan Korea dengan lebih menyeluruh lagi.

Isu Konflik Semenanjung Korea terus memanas karena kedua Korea berusaha mempertahankan *National Power* atau Kekuatan Nasional yang dimiliki masing-masing Negara. Indonesia dianggap harus membuktikan kedua Negara

konsisten terhadap kemauan yang teguh serta tanggung jawab politik dalam menerapkan kemufakatan perdamaian.

Terjadinya kemelut di Semenanjung Korea disebabkan dari pihak Korea Utara selaku dampak awal pengembangan bermacam ragam rudal yang dilakukannya. Eskalasi situasi ini menyebabkan peluang terjadinya perang terbuka yang akan sangat merugikan perekonomian dunia, terutama di Semenanjung Korea dan Asia Tenggara. Karena itu, pemerintah Korea Selatan meminta kepada negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, dalam mendukung siasat damai di semenanjung Korea.

Indonesia sejak lawas sudah memiliki jalinan diplomasi yang tangguh dan kontributif di wilayah Semenanjung Korea. Kerja sama diplomatik antara Indonesia dengan Korea Utara terbentuk pada tahun 1964.¹⁴ Hubungan diplomatik Indonesia-Korea Utara awalnya berjalan sangat baik pada masa kepemimpinan Ir. Soekarno sebagai presiden Indonesia saat masa itu dan akrab dengan negara-negara di Asia yang mempunyai paham sosialis (poros Jakarta-Beijing-Pyongyang). Pada masa tersebut Indonesia sangat aktif menjalin kerja sama dengan Korea Utara, yang dikenali melalui penyerahan gelar kehormatan untuk Kim Il Sung selaku pemimpin Korea Utara serta memberikan varietas jenis tanaman anggrek yang disebut Bunga Kim Ilsungia sebagai lambang persahabatan.¹⁵

¹⁴ Daniel Wertz, dkk., “DPRK Diplomatic Relations”, NCNK The National Committee On North Korea, Agustus 2016, https://www.ncnk.org/sites/default/files/issue-briefs/DPRK_Diplo_Relations_August_2016.pdf (diakses pada 2 November 2022).

¹⁵ Roike Sinaga, “*Kimilsungia Flower, a symbol cultivating Indonesia-North Korea relationship*”, The Global Review, 12 Juni 2009, http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=en&id=352&type=15 (diakses pada 2 November 2022).

Saat era kepemimpinan presiden kedua Indonesia yaitu H. M. *Soeharto*, kerja sama dengan kedua negara terus berlanjut melalui konteks aksi non-blok walaupun ikatan kedua negara dinilai canggung. Dalam periode era reformasi, khususnya di masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia dan Korea Utara membenahi hubungan strategis dalam aspek kemanusiaan dan investasi ekonomi.¹⁶

Selanjutnya, Indonesia meresmikan hubungan diplomatik dengan Korea Selatan pada tahun 1973.¹⁷ Jalinan diplomasi antara Indonesia dan Korea Selatan berlangsung baik dalam era Orde Baru sampai era reformasi yang dikenali melalui kerja sama ekonomi antar kedua bangsa. Pasca Reformasi, jalinan kedua bangsa bergerak ke markah yang lebih maju dengan para pimpinan kedua negara sama-sama berkunjung dengan tujuan membahas tentang topik-topik krusial seperti perekonomian, politik, kebudayaan, dan kesejahteraan bangsa.

Sebagai anggota ASEAN, Indonesia ingin tetap berperan penting dalam rancangan damai di Semenanjung Korea. Salah satunya dengan terus merespon secara baik kemajuan proses perdamaian, dan ketika waktunya tiba, ASEAN dapat berkontribusi dalam evolusi perubahan di Korea Utara karena kemampuan ASEAN untuk mencapai politik yang damai.

Indonesia merupakan negara yang secara tidak langsung bertetangga dengan kawasan Semenanjung Korea yang dimana segala aktivitas negara-negara

¹⁶ The President Post, *Indonesia and North Korea Strengthen Bilateral Relations*, <http://www.thepresidentpost.com/?p=18335> (diakses pada 3 November 2022).

¹⁷ Kedutaan Besar Republik Korea untuk Indonesia, *Sejarah Hubungan Diplomatik*, <http://idn.mofat.go.kr/worldlanguage/asia/idn/bilateral/politik/sejarah/index.jsp> (diakses pada tanggal 3 November 2022).

di Semenanjung Korea dapat mempengaruhi kedaulatan dan kedamaian negara Indonesia, khususnya terkait percobaan peluncuran nuklir Korea Utara. Indonesia diharuskan untuk mempunyai rekognisi keamanan nasional untuk melindungi pertahanan bangsa dan negara. Jati diri bangsa Indonesia selaku mediator bertekad untuk menciptakan dunia yang tenteram dari berbagai macam uji coba dan peledakan nuklir yang mengancam stabilitas keamanan global.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penelitian yang dilakukan oleh penulis ini bermaksud untuk menjelaskan tentang “Bagaimana Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Upaya Memulihkan Perdamaian dan Stabilitas di Semenanjung Korea tahun 2020-2022?”

1.3 Tujuan Penelitian

Selain untuk mengetahui sejarah yang menyebabkan Semenanjung Korea terbelah menjadi dua Negara, tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Indonesia sebagai anggota ASEAN yang berkawan baik dengan Korea Selatan dan memiliki hubungan bilateral dengan Korea Utara dalam menangani dan memulihkan ketegangan di Semenanjung Korea yang sudah berlangsung sangat lama. Selanjutnya, penelitian ini juga bermaksud untuk menelaah Kebijakan Luar Negeri Indonesia yang bergerak dalam upaya untuk memulihkan perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan salah satu sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat selama masa perkuliahan dan berguna dalam kehidupan nyata. Selain itu, penelitian ini merupakan langkah pribadi penulis untuk mengetahui motivasi Indonesia dalam perannya sebagai mediator konflik.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini bertujuan untuk membantu peneliti memahami sejauh mana upaya negara dalam mengembangkan kebijakan untuk menerapkan aturan dan standar yang sejalan dengan kepentingan nasional bangsa. Penelitian di sinipun bertujuan untuk membagikan penjelasan lebih lanjut pada kalangan mengenai kebijakan luar negeri satu bangsa bisa menurunkan umpan yang baik dan buruk pada negara tersebut dan negara-negara yang bekerja sama dengannya. Besar harapan peneliti supaya penelitian ini bisa meninggalkan *insight* yang mendukung maupun sebagai acuan untuk penelitian sejenis pada waktu yang akan datang.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini berguna sebagai memberikan pengetahuan baru bahwasannya Indonesia juga turut berperan dalam usaha perdamaian di Semenanjung Korea. Dengan begitu, masyarakat dapat mengambil sisi baik yang dilakukan dalam hubungan Bilateral antar Indonesia dan Negara-negara di Semenanjung Korea.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian mempunyai beberapa bab pembahasan yang menjelaskan setiap bagian-bagian yang dibutuhkan dalam penelitian. Setiap bagian bab tersebut mempunyai perannya masing-masing dalam menjelaskan bagian yang dapat digunakan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian ini. Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu Semenanjung Korea. Latar belakang masalah pada bab ini menjelaskan bagaimana proses terjadinya perang Korea dan bagaimana Indonesia dapat mengambil andil sebagai mediator dalam upaya memulihkan perdamaian di wilayah Semenanjung Korea ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam topik penelitian, kajian kepustakaan, dan kerangka pemikiran. Kajian Kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kosep Manajemen Konflik, Teori Kekuatan Nasional, dan Teori Perdamaian Demokratis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan yang digunakan dalam penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data. Di dalam bab ini, penulis menjelaskan bagaimana sistematika

penulisan melalui pendekatan penggunaan metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dan cara pengelolaan atau analisis data yang digunakan.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai keamanan di Semenanjung Korea dengan menjelaskan Kekuatan militer Korea Utara dan Korea Selatan, Sejarah Militer kedua Negara, serta dampak yang ditimbulkan dari pengembangan militer yang dilakukan oleh kedua Negara tersebut.

BAB V HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang hasil dari penelitian yang sudah dilakukan melalui beberapa bahan rujukan yang telah dikumpulkan sebelumnya. Penulis berusaha untuk menjelaskan peran Indonesia yang menjadi topik utama penelitian ini dengan menggunakan analisis dan dikaitkan dengan teori serta konsep yang telah ditentukan.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat dibangun berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan.

